

ABSTRACT

The importance of the role of street vendors (PKL) in the urban economy of Indonesia often leads to issues of order and spatial planning. Sampang Regency, characterized by a dense population and limited public space, faces significant challenges in managing PKL activities. The research method used involves data collection techniques through interviews, observations, and document studies. The results show that the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in regulating PKL still faces various obstacles such as limited resources, lack of coordination between agencies, and resistance from PKL parties. Existing regulations, such as Regional Regulation Number 7 of 2015 and Sampang Regent Regulation Number 3 of 2017, have stipulated the locations, operating hours, sanitation, and cleanliness that must be adhered to by PKL. However, implementation in the field remains suboptimal. The conclusion of this research is the need for improved coordination between Satpol PP and related agencies, as well as stricter and more consistent law enforcement. Additionally, public and PKL awareness of the applicable regulations needs to be enhanced to achieve the desired order.

Keywords: Civil Service Police Unit-order-street vendors-Sampang Regency-regulations-law enforcement.

ABSTRAK

Pentingnya peran PKL dalam ekonomi perkotaan Indonesia, yang sering kali menimbulkan masalah ketertiban dan tata ruang. Kabupaten Sampang, dengan karakteristik penduduk yang padat dan ruang publik terbatas, menghadapi tantangan besar dalam mengelola aktivitas PKL. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam menertibkan PKL masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar instansi, dan resistensi dari pihak PKL. Regulasi yang ada, seperti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 3 Tahun 2017, telah menetapkan lokasi, jam operasional, sanitasi, dan kebersihan yang harus dipatuhi oleh PKL. Namun, implementasi di lapangan masih belum optimal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan koordinasi antara Satpol PP dan instansi terkait, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat dan PKL mengenai peraturan yang berlaku juga perlu ditingkatkan untuk mencapai ketertiban yang diharapkan.

Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja-ketertiban-pedagang kaki lima-Kabupaten Sampang-regulasi-penegakan hukum.